

**SKRIPSI**

**SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG**



**Disusun Oleh :**

**ROSNANI  
2014.235.00.125**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
MAKASSAR  
2018**

**SKRIPSI  
PENGESAHAN**

**SISTEM KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG**


Disusun dan Diajukan Oleh

**ROSNANI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.125

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Tanggal 10 Januari 2018  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

  
Dr. Najmi Kamarjah, SE., M. Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar  


Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

# SKRIPSI

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : SISTEM KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

Pada hari ini, Rabu, 10 Januari 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama Rosnani dengan Nomor Pokok 2014.235.00.125

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Wahidin, M. Si

Sekretaris : Erni Cahayani Ibrahim, SE., Ak., MM

Anggota : Dr. Najmi Kamariah, SE., M. Si



  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

# SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (SI) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 10 Januari 2019

Yang menyatakan,



*[Handwritten signature]*  
R. S. NAWI

NPM. 2019. 235. 00. 125

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu Alaikum Wr.Wb**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang”**.

Dalam kurung waktu penulisan terdapat banyak hambatan, tantangan dan masalah dalam menyiapkan skripsi ini namun dapat terselesaikan. Semua tak lepas berkat dukungan dan saran-saran yang membangun dan dukungan dari orang-orang terdekat, karib kerabat dan orang-orang sekitar penulis selama ini.

Maka izinkan penulis terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda (alm.) Rahima dan Ibunda Sida atas doa, dorongan, semangat dan bantuan yang diberikan dengan apapun selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Amir Imbaruddin, MDA.,Ph.D selaku Ketua STIA – LAN Makassar yang telah memberikan izin dan arahan yang baik sehingga penulis memperoleh ilmu yang banyak dan pendidikan yang baik selama di kampus STIA-LAN Makassar.
3. Dr. Najmi Kamariah, SE., M.Si selaku pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan dan saran-saran sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

4. Drs.H. Muslimin Bando, M.Pd selaku Bupati Kabupaten Enrekang yang telah mendukung dan memberikan izin Belajar selama perkuliahan.
5. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang terima kasih atas segala bantuan dukungan selama penulis mengadakan penelitian.
6. Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program studi atas ijin untuk meneliti Dan saran yang diberikan makin membuka wawasan dan pemikiran selama menulis skripsi ini.
7. Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si Selaku PA yang selama ini telah memberikan saran-saran yang membantu dalam masa perkuliahan.
8. Suami dan anak tersayang yang telah mendukung saya selama ini mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
9. Teman - teman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan, kebaikan dan kerjasama yang telah diberikan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Enrekang, 22 Desember 2017**

**Penulis**

## INTISARI

### SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Penulis : Rosnani

Penasehat : Dr. Najmi Kamariah, SE.,M.Si

Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang keuangan serta menguatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan pada organisasi pemerintahan membawa konsekuensi tentang pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan pada laporan keuangan. Baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument utama dalam penelitian sehingga data yang diperoleh dapat menunjang keterangan yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian.

Hasil penelitian didasarkan pada tiga indikator yaitu pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan. Berdasarkan hasil analisis pencatatan masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,83, pengikhtisaran dengan nilai 4,29 termasuk dalam kategori sangat baik serta pelaporan juga termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,72. Adapun nilai rata – rata yang dihasilkan dari penjumlahan nilai rata – rata keseluruhan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 4,61. Sehingga sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan, maka sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang berada pada rentang interval sangat baik.

Kata kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERYATAAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Teori.....	9
1. Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	19
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	27
C. Defenisi Operasional.....	29
D. Kerangka Pikir .....	31
E. Pertanyaan Penelitian .....	33
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN .....	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Desain Penelitian .....	34
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Instrumen Penelitian .....	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	40
A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian .....	40
B. Karakteristik Responden .....	47
C. Deskripsi Data dan Analisis Data .....	49



BAB V PEMBAHASAN .....	72
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	72
1. Pencatatan .....	73
2. Pengikhtisaran .....	74
3. Pelaporan.....	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DARTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Defenisi Operasional .....	31
Tabel 2 : Skala pengukuran SKAD menggunakan Skala Likert .....	39
Tabel 3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
Tabel 4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	49
Tabel 6 : Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan .....	49
Tabel 7 : Pernyataan Responden Mengenai Analisis Transaksi / Identifikasi Transaksi Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	50
Tabel 8 : Pernyataan Responden Mengenai Bukti Transaksi pada Tiap Transaksi Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	51
Tabel 9 : Pernyataan Responden Mengenai Pengklasifikasian Transaksi Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	51
Tabel 10 : Pernyataan Responden Mengenai Pencatatan Secara Kronologis Transaksi Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	52
Tabel 11 : Pernyataan Responden Mengenai Pengklasifikasian Transaksi Keuangan Sesuai dengan Pos - Posnya Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	53
Tabel 12 : Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pencatatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	54
Tabel 13 : Pernyataan Responden Mengenai Penyusunan Neraca Saldo Berdasarkan Akun Buku Besar Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	55
Tabel 14 : Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	56
Tabel 15 : Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Neraca Lajur Pada Akhir Periode Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	56
Tabel 16 : Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Ayat Jurnal Penutup Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	57
Tabel 17 : Pernyataan Responden Mengenai Neraca Saldo Setelah Penutupan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	58
Tabel 18 : Pernyataan Responden Mengenai Ayat Jurnal Pembalik Setelah Penutupan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	58

Tabel 19 : Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pengikhtisaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	59
Tabel 20 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	60
Tabel 21 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Berupa Laporan Neraca Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.....	61
Tabel 22 : Pernyataan Responden Mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	62
Tabel 23 : Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Dilakukan Secara Konsisten Dan Periodik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	62
Tabel 24 : Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pelaporan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	63
Tabel 25 : Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Kerangka Pikir .....	32
Gambar 2 : Aktifitas Pencatatan .....	55
Gambar 3 : Bukti Transaksi .....	56
Gambar 4 : Laporan Realisasi Anggaran .....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Paket undang-undang dibidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan membawa konsekuensi mengenai pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan negara benar-benar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau lebih dikenal dengan istilah *Good Governance*.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya UU No.22/1999 yang diperbaharui dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 yang diperbaharui dengan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah

daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara.

Otonomi daerah yang saat ini tengah bergulir di Indonesia merupakan implementasi UU No.22/1999 yang diperbaharui menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Sabarno (2008:15) menyatakan bahwa konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipersepsikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan ke dalam konstruksi desentralisasi, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah hingga akuntabilitas pemerintahan daerah, selain itu mendorong penegasan kembali peranan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan mengenai adanya otonomi daerah.

Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sabarno (2008:7) mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendelegasian kewenangan ini disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Otonomi daerah yang bersifat luas tersebut telah diberikan kepada pemerintah daerah dengan maksud agar pemerintah daerah dapat meningkatkan

efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good governance*. Disisi lain tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi tidak terkecuali akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang menjadi sorotan utama pada organisasi sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Mardiasmo (2002:57) menjelaskan bahwa:

Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2004:29) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya lebih jauh. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selain itu, *Governmental Accounting Standard Board* (GASB) dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas

merupakan dasar pelaporan keuangan di organisasi pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin menguat. Berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *Good Governance*. *Good Governance* sendiri diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif serta menjalankan disiplin anggaran.

Baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan khusus (Prihandono, 2009:12).



Sistem akuntansi keuangan daerah berfungsi sebagai subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Pemerintah daerah perlu mengambil pendekatan yang menempatkan sistem akuntansi digaris depan dan mempertimbangkan dengan baik sistem dan faktor terkait manusia dan pengelolaan sistem informasi akuntansi. Pemerintah daerah harus fokus pada faktor-faktor kritis jika ingin mencapai sistem informasi akuntansi berkualitas tinggi. Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak negatif pada proses keuangan organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan kerugian pada pengambilan keputusan menurut Xu *et al* (2003).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, badan pemeriksa keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir untuk pemerintah kabupaten Enrekang meraih opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel atas pengelolaan anggaran 2015 (Berita kota Makassar) dan pada tahun 2017 BPK RI Perwakilan Sulsel kembali resmi memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemkab Enrekang berdasarkan hasil LHPK dari BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2016 (Fajar online)

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, adanya kenaikan opini merupakan adanya perbaikan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer, artinya auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu. Opini wajar dengan pengecualian (WDP), bahwa laporan keuangan yang diperiksa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan untuk pos-pos tertentu disajikan secara tidak wajar.

Selama dua tahun berturut-turut pemerintah kabupaten Enrekang belum dapat memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan,

pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang belum memadai yang disebabkan belum optimalnya sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil pokok bahasan dengan judul penelitian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

”Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ? ”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, dan mengkaji sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam aspek teoretis, praktis dan regulasi sebagai berikut :

### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca sehubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Serta diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan penelitian baik secara khusus maupun secara umum serta menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka mencapai tujuan instansi secara efektif, efisien, menyampaikan laporan keuangan secara berkualitas, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

###### **a. Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapai sistem.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan dearah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelolah keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki tiga pilar utama yaitu : *transparansi, akuntabilitas* dan *partisipatif* (Renyowijoyo, 2008:216).

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri

Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas”. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

Berdasarkan pengertian diatas, pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintahan daerah mengisi kas daerah. Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat sesuai dengan UUD 1945.

Menurut permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

1. Pencatatan

Pada tahap ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti memorial, dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi

dalam buku jurnal (*journal entry*) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (*posting to ledger*). Pencatatan terdiri dari :

- a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal
- c) Memindahbukuan (*posting*) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar

## 2. Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat, dikelompokkan, disajikan secara ringkas dalam daftar tersendiri, yang disebut neraca saldo (*trial balance*) Adapun proses pengikhtisaran sebagai berikut:

- a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu yang diambil dari buku besar.
- b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu penyesuaian akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*.
- c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.



- d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting sehingga akun nominal akan nol.
- e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil.
- f) Pembuatan ayat jurnal pembalik dibuat apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan.

### 3. Pelaporan

Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan, investor, kreditor, donator, analisis ekonomi, pemerhati pemerintah daerah, rakyat, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

#### **b. Ruang lingkup Keuangan Daerah**

Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, bedanya pada

ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Menurut Abdul Halim (2002:7) mengemukakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
- 3) Penerimaan daerah,
- 4) Pengeluaran daerah,
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah,
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

### **c. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007: 330). Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber

penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut :

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :

- a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan

kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

### 3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

### 4) Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mardiasmo (2000 : 3) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

- a) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*);

- b) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
- c) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;
- d) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas;
- e) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya;
- f) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;
- g) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
- h) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
- i) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
- j) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi

#### **d. Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip - prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105) antara lain.

##### **1) Transparansi**

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan

kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

## 2) Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## 3) *Value of Money*

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdaya guna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas, dkk (1989 : 279-280) adalah sebagai berikut :

### 1) Tanggung jawab (*accountability*).

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum.

### 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan.

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

## (3) Kejujuran.

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

(4) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*).

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

## (5) Pengendalian.

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

### e. Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4, azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan pengertian tentang azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil.

- 4) Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai ketentuan tertentu.
- 5) Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- 6) Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 7) Bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- 8) Keadilan adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- 9) Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.
- 10) Manfaat adalah untuk masyarakat bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## **2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

### **a. Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Prosedur Akuntansi**

Sistem akuntansi keuangan daerah menjelaskan serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Prosedur yang dimaksud adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Proses pengindentifikasian adalah pengindentifikasian ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi



tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Menurut Permendagri No.59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan:

Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut PP No.71/2010 pada lampiran I mengatakan bahwa:

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan laporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Permendagri No.13/2006 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah diatur dengan peraturan gubernur/walikota/bupati yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan yaitu tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi:

- 1) **Laporan realisasi anggaran;**
- 2) **Laporan operasional;**
- 3) **Laporan perubahan ekuitas;**

**4) Neraca;****5) Catatan atas laporan keuangan.**

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Berdasarkan Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi keuangan daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, Prosedur akuntansi pengeluaran kas, Prosedur akuntansi aset tetap dan Prosedur akuntansi selain kas.

**b. Sistem dan prosedur pencatatan****1) Sistem Pencatatan**

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian demikian kurang tepat. Hal ini disebabkan akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Ada beberapa sistem pencatatan menurut Halim (2007:42) yaitu sebagai berikut:

**a) *Single Entry***

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau pencatatan satu kali saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi hanya dengan mencatatnya satu kali. Sistem pencatatan *single entry* ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu kurang bagus untuk pelaporan dan sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

**b) *Double Entry***

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat sebanyak dua kali atau dikenal dengan istilah menjurnal. Sehingga membentuk suatu pikiran dalam dua sisi berlawanan yaitu debit dan kredit secara berpasangan. Dengan demikian, maka disetiap transaksi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross check*. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, *double entry* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit.

### c) *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambahkan dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dilaksanakan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

## 2) **Prosedur Pencatatan**

Menurut PP No.71/2010 serangkaian prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan terbagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

### a) **Prosedur pencatatan akuntansi pendapatan**

Transaksi pendapatan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

### b) **Prosedur pencatatan akuntansi belanja**

Transaksi belanja pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan dua jurnal.

### c) **Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan**

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

### d) **Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset**

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) lebih kepada pencatatan atas pengakuan aset yang muncul

dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis/nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal awal oleh fungsi akuntansi PPKD.

**e) Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban**

Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) lebih kepada pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat memorial yang memuat informasi tentang sejenis/nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD.

**f) Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana**

Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan oleh pmda.

**c. Sistem Pengakuan (Dasar Akuntansi)**

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi didasarkan pada beberapa prinsip dasar akuntansi. Salah satunya adalah *matching principle* (prinsip penandingan) yaitu menandingkan pendapatan dengan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan. Dalam upaya menandingkan antara pendapatan dan beban, akuntansi dibagi menjadi atas dua basis, yaitu basis aktual dan basis kas.

Pengertian pengakuan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah:

Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa yang terkait. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Adapun beberapa basis atau dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

### **1) Basis Kas**

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil aktivitasnya tidak banyak serta tidak rumit, penerapan basis kas masih dipandang wajar saat awal otonomi daerah. Namun, seiring berjalannya waktu cash basis sudah tidak diterapkan lagi.

### **2) Basis Akrua**

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan periode terjadinya. Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada

saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis akrual ini akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagi hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual akan meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas.

### **3) Basis Kas Modifikasian**

Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

### **4) Basis Akrual Modifikasian**

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual sebagai besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Banyak penelitian yang telah dilakukan guna mencari faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Penelitian yang telah Kurnia (2013) dengan menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Propinsi Sumatera Barat, dan (2) Kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan Propinsi Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Soleha, Nurhayati (2014) menganalisis pengaruh implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Metode yang dipergunakan ialah metode survey eksplanatori. Metode analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erryana dan Hendri (2016) tentang determinan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja operasional daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari belanja modal daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawatengah dan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari status daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anandita (2015) tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintahan kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan Akuntabilitas Laporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan baik dan memadai. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dan memiliki hubungan yang kuat. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi dan meningkatkan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan mutu pengawasan serta dapat memberikan informasi keuangan yang akuntabel yang dibutuhkan oleh pengguna informasi laporan keuangan.



### C. Definisi operasional variabel

Sistem akuntansi keuangan daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah merupakan serangkaian prosedur yang terdiri dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisran serta pelaporan yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Adapun indikator sistem akuntansi keuangan daerah termuat dalam permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pencatatan, pengikhtisran dan pelaporan. Ketiga indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pencatatan

Pencatatan merupakan bagian dari pengikhtisran dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi yang dicatat dalam buku harian atau jurnal kemudian diposting ke dalam akun buku besar berdasarkan kelompok atau sejenisnya.

#### 2. Pengikhtisran

Proses pengikhtisran merupakan penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi *up to date*, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan, pembuatan neraca saldo setelah penutupan dan yang terakhir adalah

pembuatan ayat jurnal pembalik apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan.

### 3. Pelaporan

Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan, investor, kreditor, donator, analisis ekonomi, pemerhati pemerintah daerah, rakyat, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Pada tabel 1. dapat dilihat ringkasan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1.

## Defenisi Opersional

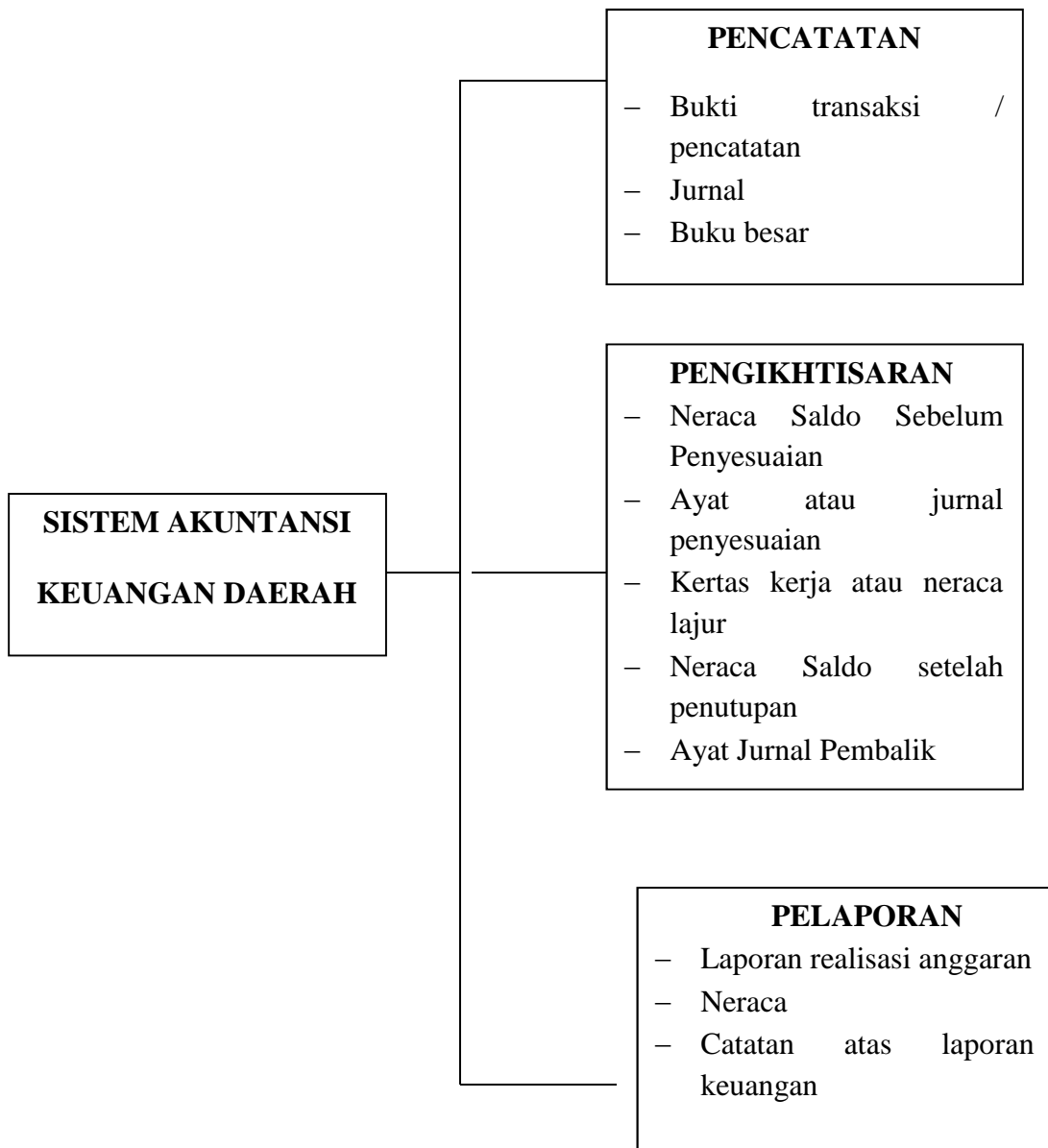
Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
1	2	4	5
Variabel			
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bukti transaksi / pencatatan</li> <li>– Jurnal</li> <li>– Buku besar</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>PENGIKHTISARAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian</li> <li>– Ayat atau jurnal penyesuaian</li> <li>– Kertas kerja atau neraca lajur</li> <li>– Neraca Saldo setelah penutupan</li> <li>– Ayat Jurnal Pembalik</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>PELAPORAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.</li> </ul>	Ordinal ( <i>Likert Scale 5 Poin</i> )	Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Afifah (2009 : 15), dan Putri, Ansella (2015, 63)

**D. Kerangka Pikir**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan. Untuk lebih jelas berikut digambarkan rerangka penelitian untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun rerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:

**Gambar 1.**  
**Kerangka Pikir**

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Afifah (2009 : 15), dan Putri, Ansella (2015, 63)



**E. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) dari segi pencatatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) dari segi pengikhtisaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) dari segi pelaporan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?

## **BAB III**

### **DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 1999:12). Berdasarkan karakteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi.

##### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **a. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

###### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2017.

#### **B. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yakni penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrument utama dalam pengumpulan data.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2011:117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai

pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang yang berjumlah 56 orang

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiyono (2011:118). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud peneliti (Kuncoro, 2014). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini 56 sampel terdiri dari 1 kuasa pengguna anggaran, 1 pejabat penata usaha keuangan, 35 pejabat pelaksana teknis kegiatan, 1 kabag keuangan, 18 staf. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Responden penelitian adalah seluruh pegawai pengelola keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Responden adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara, dengan pertimbangan berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan dan terlibat langsung secara teknis terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara media). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang)

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer ini berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang yang memenuhi kriteria sampel.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data secara umum menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2011:308) untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel penelitian, adapun beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

#### 1. Kuesioner

Melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan tertulis tentang masalah yang diteliti untuk diisi oleh responden dengan jawaban yang sebenar-benarnya demi keakuratan data.

#### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan langsung dengan peneliti dan informan yang telah ditetapkan.

#### 3. Observasi

Observasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang



#### 4. Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan pengumpulan data dengan mempelajari dan menelaah data-data yang diperoleh dari Sekretariat Daerah yang relevan dengan substansi penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran teori melalui buku-buku, laporan, jurnal atau tulisan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kuesioner

Peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (V) pada kolom atau tempat yang sesuai. Menurut Riduwan (2002:2) kelebihan dari model tertutup adalah responden mudah dalam memberikan penilaian, mudah dalam pemberian kode dan responden tidak perlu menulis lebih banyak. Penelitian ini menggunakan skala *likert* satu sampai lima.

#### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang dimaksud berupa pedoman berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian dalam hal ini kepada pegawai yang mengelola keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

### 3. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informan yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

### 4. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen yang dimaksud berupa data-data yang diperoleh dari Sekretariat Daerah yang relevan dengan substansi penelitian seperti buku-buku, laporan, jurnal atau tulisan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah metode deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan data dalam bentuk tabulasi data sehingga lebih bermakna dan lebih mudah dipahami, untuk dapat melihat bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah dengan menggunakan indikator pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan dengan menggunakan instrument pengukuran skala likert.

### **2. Analisis Data**

Teknis analisis data dilakukan setelah dilakukan pengumpulan data-data hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, sehingga

didapatkan penilaian-penilaian sesuai dengan skala yang digunakan yaitu skala rating atau *rating scale*. Skala rating digunakan untuk mendapatkan data kualitatif dari data kuantitatif yakni berupa angka-angka yang telah ditafsirkan. Sedangkan informasi hasil wawancara dan observasi akan digunakan sebagai bahan penunjang dalam penggambaran hasil analisis data kuantitatif dari kuesioner.

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$P = F/n \times 100\%$  di mana : P= Persentase

F =Frekuensi

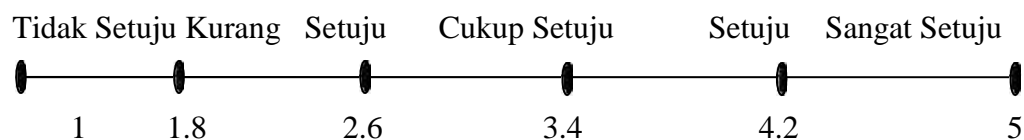
N = Jumlah responden

Untuk mendapatkan nilai/scoring maka digunakan rumus  $S \times F$ , di mana F adalah Frekuensi dan S adalah Skor jawaban, di mana terlihat pada tabel.

Tabel 1.  
Skala pengukuran kualitas pelayanan menggunakan Skala Likert

No	Ukuran Responden	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Cukup Setuju	3
4	Kurang Setuju	2
5	Tidak Setuju	1

Jika dalam bentuk interval, maka terlihat sebagaimana berikut :



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian**

##### **1. Dasar Hukum Organisasi**

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Terbentuk berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menetapkan Peraturan Pemerintah bahwa Sekretariat Daerah adalah Tipe A, selanjutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Fungsi Sekretariat Daerah**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang.
- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantapkan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
- e. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah.
- f. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan dan pembuatan hukum menyangkut tugas pokok pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **3. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kab. Enrekang**

#### **a. Visi**

Visi Sekretariat Daerah adalah terwujudnya sistem administrasi pemerintahan daerah yang handal menuju enrekang yang maju aman dan sejahtera.

#### **b. Misi**

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil

dengan baik. Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah tersebut dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Untuk mewujudkan visi di atas, Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua ) misi sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem administrasi pemerintahan daerah yang handal demokratis, profesional, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
- 2) Memberdayakan sumber daya manusia aparatur dalam rangka penerapan disiplin kerja, pelayanan prima yang berkualitas disetiap jenjang organisasi perangkat daerah.

#### **4. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Enrekang**

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Dan Staf Ahli Kabupaten Enrekang. Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang memiliki susunan pejabat struktural organisasi dengan fungsi serta tugas sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan.
  - b) Sub Bagian Adm Pemerintahan Kec/Kelurahan dan Tugas Pembantuan
  - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama
- 2) Bagian Humas

- a) Sub Bagian Protokol
  - b) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi
  - c) Sub Bagian Persandian
- 3) Bagian Hukum;
- a) Sub Bagian Perundang-Undangan
  - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
  - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
- 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
- a) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - b) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
  - c) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Kehidupan Keagamaan.
- b. Asisten Perekonomian dan Adm Pembangunan
- 1) Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
- a) Sub Bagian Adm Pembangunan.
  - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
  - c) Sub Sub Bagian Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi.
- 2) Bagian Layanan Pengadaan
- a) Sub Bagian Adm Sistem Informasi Pengadaan
  - b) Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi
  - c) Sub Bagian Fasilitasi Pelayanan Pengadaan
- 3) Bagian Adm Sumber Daya Alam

- a) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
  - b) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM
  - c) Sub Bagian Peternakan dan Perikanan.
- c. Asisten Administrasi Umum
- 1) Bagian Keuangan
    - a) Sub Bagian Anggaran
    - b) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
    - c) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
  - 2) Bagian Aset
    - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan
    - b) Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
    - c) Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian
  - 3) Bagian Umum
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Adm Pimpinan
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga
    - c) Sub Bagian Perlengkapan
  - 4) Bagian Organisasi dan Tatalaksana
    - a) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan
    - c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.



Dari Susunan Organisasi diatas memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

**a. Sekretaris Daerah**

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta melaksanakan tugas sesuai petunjuk peraturan perundang - undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang.
- 2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan,
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang.

**b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang asisten mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan bagian – bagian lingkup tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

- 2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan

#### **c. Asisten Perekonomian dan Adm Pembangunan**

Asisten perekonomian dan administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang asisten, mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan bagian – bagian lingkup tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan sertapelayanan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang pembangunan.
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang pengembangan sumber daya alam.
- 3) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang perekonomian.

#### **d. Asisten Administrasi Umum**

Asisten administrasi umum dipimpin oleh seorang asisten, mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan bagian – bagian lingkup tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi bidang administrasi umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas asisten administrasi umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi hukum dan Perundang - Undangan ;
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pelayanan administrasi umum;
- 3) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan;
- 4) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana.

## B. Karakteristik Responden

Jumlah pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 orang yang ditemui selama kurang lebih satu bulan lamanya penelitian. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh responden dapat diidentifikasi karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan golongan.

Secara rinci karakteristik responden atau pegawai pada kantor sekretariat daerah kabupaten Enrekang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 35 responden (62,5%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 responden (37,5%).

Tabel 3  
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	35	62,5%
Perempuan	21	37,5%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

## 2. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 36-45 tahun yaitu sebanyak 27 responden (48,21%), dilanjutkan dengan umur antara 26-35 tahun sebanyak 12 responden (21,43%), serta berumur lebih dari 45 tahun sebanyak 17 responden (30,36%) Sedangkan, responden yang berumur kurang dari 25 tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 4  
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

<b>Usia (Tahun)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<25	-	-
26-35	12	21,43 %
36-45	27	48,21 %
45>	17	30,36 %
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

## 3. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-1 yaitu sebanyak 30 responden (53,56%), pendidikan S-2 sebanyak 15 responden (26,78%), pendidikan D-3 sebanyak 1 responden (1,8%). Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SMU/SMK 10 responden (17,86%), S-3 tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 5  
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
SMU/SMK	10	17,86 %
D-3	1	1,8 %
S-1	30	53,56%
S-2	15	26,78%
S-3	-	-
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

#### 4. Pangkat / golongan

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini terdiri dari golongan III dengan jumlah responden 38 (67,86%), golongan IV dengan 9 responden (16,07%) serta golongan II dengan 9 responden (16,07%)

Tabel 6  
Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

<b>Golongan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
IV	9	16,07%
III	38	67,86%
II	9	16,07%
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

### C. Deskripsi Data dan Analisis Data

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan. Adapun hasil perhitungan yang didukung oleh wawancara dari responden dan informan dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :

### 1. Pencatatan

Pencatatan yang dimaksud merupakan bagian dari pengiktisaran dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi yang dicatat dalam buku harian atau jurnal kemudian diposting ke dalam akun buku besar berdasarkan kelompok atau sejenisnya. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada uraian berikut :

**Tabel 7**  
**Pernyataan Responden Mengenai Analisis Transaksi / Identifikasi Transaksi Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	46	82,14 %	230	270 / 56 = 4,82 (Sangat Baik)
Setuju	4	10	17.86%	40	
Netral	3				
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>270</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 46 orang responden atau 82,14% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 10 orang responden atau 17,86%, serta responden yang memilih netral, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai analisis transaksi atau identifikasi pada setiap transaksi keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,82.

**Tabel 8**  
**Pernyataan Responden Mengenai Bukti Transaksi pada Tiap Transaksi Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	50	89,28 %	250	274 / 56 = 4,89 (Sangat Baik)
Setuju	4	6	10.72%	24	
Netral	3				
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>274</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 50 orang responden atau 89,28% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 6 orang responden atau 10,72%, serta responden yang memilih netral, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai bukti transaksi sebagai pendukung pada tiap transaksi keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,89.

**Tabel 9**  
**Pernyataan Responden Mengenai Pengklasifikasian Transaksi Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	47	83,93 %	235	274 / 56 = 4,84 (Sangat Baik)
Setuju	4	9	16.07%	36	
Netral	3				
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>271</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 47 orang responden atau 83,93% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 9 orang responden atau 16,07%, serta responden yang memilih netral, kurang setuju

dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pengklasifikasian terhadap transaksi keuangan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,84.

**Tabel 10**

**Pernyataan Responden Mengenai Pencatatan Secara Kronologis Transaksi Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

<b>Uraian</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai (F)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Bobot x Nilai</b>	<b>Persentase Nilai Skor</b>
Sangat Setuju	5	46	82,14 %	230	268 / 56 = 4,78 (Sangat Baik)
Setuju	4	8	14.29%	32	
Netral	3	2	3,57 %	6	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>268</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 46 orang responden atau 82,14% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 8 orang responden atau 14, 29%, serta responden yang memilih netral sebanyak 2 orang responden atau 3,57%. Responden yang memilih kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pencatatan secara kronologis transaksi keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,78.



**Tabel 11**  
**Pernyataan Responden Mengenai Pengklasifikasian Transaksi Keuangan Sesuai dengan Pos - Posnya Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	48	85,71 %	240	271 / 56 = 4,84 (Sangat Baik)
Setuju	4	7	12,5%	28	
Netral	3	1	1,79%	3	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>271</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 48 orang responden atau 85,71% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 7 orang responden atau 12,5%, serta responden yang memilih netral sebanyak 1 orang responden atau 1,79%. Responden yang memilih kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pengklasifikasian transaksi keuangan sesuai dengan pos – posnya pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,84.

Adapun pernyataan responden mengenai sub variabel pencatatan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 12**  
**Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pencatatan**  
**Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

NO	Pernyataan	Total Skor	Keterangan
1	Setiap transaksi keuangan pada kantor sekretariat daerah ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi	4,82	Sangat Baik
2	Setiap transaksi keuangan pada kantor sekretariat daerah ini didukung oleh bukti transaksi.	4,89	Sangat Baik
3	Pada kantor sekretariat daerah ini dilakukan Pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.	4,84	Sangat Baik
4	Pada kantor sekretariat daerah ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.	4,78	Sangat Baik
5	Pada kantor sekretariat daerah ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya	4,84	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>24,17</b>	
<b>24,17 / 5 = 4,83 (Sangat Baik)</b>			

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 12 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil penelitian responden terhadap sub variabel pencatatan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 4,83. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel pencatatan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam interval sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas pernyataan yang diberikan kepada 56 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun bukti pencatatan yang dikumpulkan dari hasil observasi dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2**  
**Aktifitas Pencatatan**



Pada gambar diatas terlihat bahwa transaksi keuangan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dicatat dalam buku harian atau jurnal yang

kemudian diposting dalam buku besar berdasarkan kelompok atau sejenisnya. Selanjutnya setiap transaksi keuangan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang didukung oleh bukti transaksi, yang dibuktikan dengan gambar berikut :

**Gambar 3**  
**Bukti Transaksi**



KWITANSI NO. :

PK  
NPWP  
ANGGARAN : 2017  
KODE REK. : 5.2.2.13.03

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Banyaknya Uang : **Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**

Untuk Pembayaran : Bayar An. Hj. Eka Indaryanti (R.M.Maifa) Biaya Makanan dan Minuman Tamu Wakil Bupati pada Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan ul Bulan November TA. 2017

Jumlah : Rp 8.500.000  
Mengetahui  
SEKRETARIS DAERAH  
**SETDA**  
Drs. H. CHAIRIL LATANRO, MM  
NIP. 196001198812 1 001

**TELAH DI TELITI**  
TANGGAL : 12/12/2017  
PARAF : \*

**LUNAS DI BAYAR**  
TANGGAL : 13/12/2017  
NO. BUKU : 1676 / 9  
PARAF : \*

Peserta Pelaksanaan  
Kegiatan  
*[Signature]*  
SINUSI, S.I.P.  
NIP. 19611231 198803 1 107

Dibayar Lunas  
Bendahara Pengeluaran,  
*[Signature]*  
HARTON PRIYONO SUBAGYO, SH  
NIP. 19790424 200701 1 018

**RUMAH MAKAN**  
Enrekang, 02 November 2017  
Mengetahui  
*[Signature]*  
HJ. EKA INDARYANTI

--	--	--	--

1. Penyerahan Barang tersebut diatas dalam jangka waktu 2 (dua) hari, dan kami sudah terima selambat-lambatnya tanggal 2 November 2017 terhitung tanggal Surat Pesanan Kami
2. Pembayaran akan dilakukan melalui Pemimpin Kegiatan dengan menggunakan Kode Rekening. 5.2.2.13.03
3. Keterlambatan penyerahan barang / pekerjaan saudara akan dikenakan denda sesuai persetujuan yang berlaku
4. Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak dan biaya lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Enrekang, 1 November 2017

Mengetahui  
SEKRETARIS DAERAH  
**SETDA**  
Drs. H. CHAIRIL LATANRO, MM  
NIP. 196001198812 1 001

PEMIMPIN KEGIATAN  
*[Signature]*  
SINUSI, S.I.P.  
NIP. 19611231 198803 1 107

**TELAH DI TELITI**  
TANGGAL : 12/12/2017

Gambar diatas merupakan gambaran yang mewakili aktifitas runititas bagian keuangan yang telah menerapkan salah satu dari indikator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu pencatatan.

## 2. Pengikhtisaran

Proses pengikhtisaran merupakan penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi *up to date*, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan, pembuatan neraca saldo setelah penutupan dan yang terakhir adalah pembuatan ayat jurnal pembalik apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Untuk mengetahui bagaimana pengikhtisaran pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada uraian berikut :

**Tabel 13**  
**Pernyataan Responden Mengenai Penyusunan Neraca Saldo Berdasarkan Akun Buku Besar Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	5	8,93 %	25	226 / 56 = 4,03 (Baik)
Setuju	4	48	85.71%	192	
Netral	3	3	5,36%	9	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>226</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 5 orang responden atau 8,93% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 48 orang responden atau 85,71%, serta responden yang memilih netral 3 orang responden atau 5,36%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai mengenai penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,03.

**Tabel 14**  
**Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5				218 / 56 = 3,89 (Baik)
Setuju	4	50	89,29%	200	
Netral	3	6	10,71%	18	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>218</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 0% responden memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 50 orang responden atau 89,29%, serta responden yang memilih netral sebanyak 6 orang responden atau 10,71%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pembuatan ayat jurnal penyesuaian untuk menyajikan data *up to date* pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 3,89.

**Tabel 15**  
**Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Neraca Lajur Pada Akhir**  
**Periode Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	48	85,71 %	240	272 / 56 = 4,86 (Sangat Baik)
Setuju	4	8	14.29%	32	
Netral	3				
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>272</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 48 orang responden atau 85,71% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 8 orang responden atau 14,29%, serta responden yang memilih netral, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pembuatan neraca lajur pada akhir periode pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,86.

**Tabel 16**  
**Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Ayat Jurnal Penutup Pada**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	4	7,14 %	20	223 / 56 = 3,98 (Baik)
Setuju	4	47	83.93%	188	
Netral	3	5	8,93 %	15	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>223</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 4 orang responden atau 7,14% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 47 orang



responden atau 83, 93%, serta responden yang memilih netral sebanyak 5 orang responden atau 8,93%. Responden yang memilih kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pembuatan ayat jurnal penutup sehingga akun nominal menjadi nol pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 3,98.

**Tabel 17**  
**Pernyataan Responden Mengenai Neraca Saldo Setelah Penutupan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	4	7,14 %	20	222 / 56 = 3,96 (Baik)
Setuju	4	46	82.14%	184	
Netral	3	6	10,72%	18	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>222</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 4 orang responden atau 7,14% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 46 orang responden atau 82, 14%, serta responden yang memilih netral sebanyak 6 orang responden atau 10,72%. Responden yang memilih kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pembuatan neraca saldo setelah penutupan yang berisi daftar akun riil pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 3,96.

**Tabel 18**  
**Pernyataan Responden Mengenai Ayat Jurnal Pembalik Setelah Penutupan**  
**Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	9	16,07 %	45	226 / 56 = 4,03 (Baik)
Setuju	4	40	71.43%	160	
Netral	3	7	12,5%	21	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>226</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 9 orang responden atau 16,07% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 40 orang responden atau 71,43%, serta responden yang memilih netral sebanyak 7 orang responden atau 12,5%. Responden yang memilih kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pembuatan ayat jurnal pembalik setelah penutupan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,03.

Adapun pernyataan responden mengenai sub variabel pencatatan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 19**  
**Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pengikhtisaran**  
**Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

NO	Pernyataan	Total Skor	Keterangan
1	Setiap akhir periode disusun neaca saldo berdasarkan akun buku besar	4,03	Baik
2	Pembuatan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode apabila ada akun-akun tertentu yang belum menyajikan <i>data up to date</i> .	3,89	Baik
3	Setiap akhir periode sekretariat daerah ini membuat kertas kerja atau neraca lajur.	4,86	Sangat Baik
4	Pembuatan Ayat jurnal penutup sehingga akun nominal menjadi nol	3,98	Baik
5	Pada kantor sekretariat daerah ini dibuat neraca saldo setelah penutupan yang berisi daftar akun riil.	4,96	Sangat Baik
6	Sekretariat daerah membuat ayat jurnal pembalik setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan.	4,03	Baik
<b>Jumlah</b>		<b>25,75</b>	
<b><math>25,75 / 6 = 4,29</math> (Sangat Baik)</b>			

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 19 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil penelitian responden terhadap sub variabel pengikhtisaran pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 4,29. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel pengikhtisaran pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam interval sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas pernyataan yang diberikan kepada 56 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

### 3. Pelaporan

Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada uraian berikut :

**Tabel 20**  
**Pernyataan Responden Mengenai Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

<b>Uraian</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai (F)</b>	<b>Persentase</b>	<b>Bobot x Nilai</b>	<b>Persentase Nilai Skor</b>
Sangat Setuju	5	50	89,28 %	250	272/ 56 = 4,86 (Sangat Baik)
Setuju	4	4	7,14%	16	
Netral	3	2	3,58%	6	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>272</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 50 orang responden atau 89,28% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 4 orang responden atau 7,14%, serta responden yang memilih netral 2 orang responden atau 3,58%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pembuatan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,86.

**Tabel 21**  
**Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Berupa Laporan Neraca Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	50	89,28 %	250	272 / 56 = 4,86 (Sangat Baik)
Setuju	4	4	7,14%	16	
Netral	3	2	3,58%	6	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>272</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 50 orang responden atau 89,28% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 4 orang responden atau 7,14%, serta responden yang memilih netral 2 orang responden atau 3,58%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pembuatan laporan keuangan berupa laporan neraca pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,86.

**Tabel 22**  
**Pernyataan Responden Mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	50	89,28 %	250	271 / 56 = 4,84 (Sangat Baik)
Setuju	4	3	5,36%	12	
Netral	3	3	5,36%	9	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>271</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 50 orang responden atau 89,28% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 3 orang responden atau 5,36%, serta responden yang memilih netral sebanyak 3 orang responden atau 5,36%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,84.

**Tabel 23**  
**Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Dilakukan Secara Konsisten Dan Periodik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

Uraian	Bobot	Nilai (F)	Persentase	Bobot x Nilai	Persentase Nilai Skor
Sangat Setuju	5	20	35,71 %	100	242 / 56 = 4,32 (Sangat Baik)
Setuju	4	34	60,72%	136	
Netral	3	2	3,57 %	6	
Kurang Setuju	2				
Tidak Setuju	1				
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>242</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 20 orang responden atau 35,71% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 34 orang responden atau 60,72%, serta responden yang memilih netral sebanyak 2 orang responden atau 3,57%. Responden yang memilih kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa pernyataan responden mengenai pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang

termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 4,32.

Adapun pernyataan responden mengenai sub variabel pelaporan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 24**  
**Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pelaporan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

NO	Pernyataan	Total Skor	Keterangan
1	Pada kantor sekretariat daerah ini setiap akhir periode membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran.	4,86	Sangat Baik
2	Pada kantor sekretariat daerah ini setiap akhir periode membuat laporan keuangan berupa laporan neraca.	4,86	Sangat Baik
3	Membuat Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.	4,84	Sangat Baik
4	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.	4,32	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>18,88</b>	
<b>18,88 / 4 = 4, 72 (Sangat Baik)</b>			

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 19 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil penelitian responden terhadap sub variabel pelaporan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 4, 72. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel pelaporan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam interval sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas pernyataan yang diberikan kepada 56 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta dibawah ini dicantumkan neraca periode 31 Desember 2016 dan 2015 serta laporan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang yang didapatkan dari observasi langsung periode 31 Desember 2015 dan 2014 serta periode 31 Desember 2016 dan 2015.

**SEKRETARIAT DAERAH KAB. ENREKANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**  
(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah	10,500,000,00	26,325,000,00	251,71	25,750,000,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6	Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>26.325.000,00</b>	251,71	<b>25.750.000,00</b>
8					
9	<b><u>BELANJA</u></b>				
10	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>				
11	Belanja Pegawai	9.666.366.625,00	8.801.116.187,00	90,76	6.523.852.198,00
12	Belanja Barang dan Jasa	23.910.740.168,00	22.277.515.195,00	93,17	17.275.477.192,00
13	<b>Jumlah Belanja Operasi (11 s/d 12)</b>	<b>33.577.106.793,00</b>	<b>31.078.631.382,00</b>	<b>90,44</b>	<b>23.799.329.390,00</b>
14					
15	<b>BELANJA MODAL</b>				
16	Belanja Tanah	1.076.991.500,00	90.000.000,00	8,36	88.328.000,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	2.259.355.000,00	2.167.866.000,00	95,95	656.843.000,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	50.677.500,00	30.000.000,00	59,20	70.000.000,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
21	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
22	<b>Jumlah Belanja Modal (16 s/d 21)</b>	<b>3.387.024.000,00</b>	<b>2.287.866.000,00</b>	94,23	<b>815.171.000,00</b>
23					
24	<b>JUMLAH BELANJA (13+22)</b>	<b>36.964.130.793,00</b>	<b>33.366.497.382,00</b>	90,266	<b>24.614.500.390,00</b>
25	<b>SURPLUS/DEFISIT (7-24)</b>	<b>(36.953.630.793,00)</b>	<b>(33.340.172.382,00)</b>	90,22	<b>(24.588.750.390,00)</b>



**Gambar 4**  
**Lapran Realisasi Anggaran 2015 - 2016**

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
SEKERTARAT DAERAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

No	URAIAN	Anggaran 2015	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	100,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	11.500.000,00	27.325.000,00	238,29	26.029.000,00
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sen	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Jumlah PAO	11.500.000,00	27.325.000,00	238,29	26.029.000,00
7					
8	JUMLAH PENDAPATAN	11.500.000,00	27.325.000,00	238,29	26.029.000,00
9					
10	BELANJA				
11	BELANJA OPERASI				
12	Belanja Pegawai	7.709.878.817,00	7.182.845.840,00	92,42	7.908.984.900,00
13	Belanja Barang dan Jasa	24.599.584.800,00	24.460.662.183,50	99,11	24.350.081.885,00
14	Belanja Bunga	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Belanja Subsidi	0,00	0,00	100,00	0,00
16	Belanja Hibah	0,00	0,00	100,00	0,00
17	Belanja Bantuan	0,00	0,00	100,00	0,00
18	Jumlah Belanja Operasi	34.469.583.217,00	32.641.298.023,50	95,28	32.157.078.195,00
19					
20	BELANJA MODAL				
21	Belanja Tanah	754.000.000,00	541.000.000,00	71,87	80.000.000,00
22	Belanja Peralatan dan Mesin	2.745.170.000,00	2.584.000.000,00	94,15	2.192.768.000,00
23	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	100,00	0,00
24	Belanja Jalan, Jembatan dan Jaring	0,00	0,00	100,00	0,00
25	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	100,00	0,00
26	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	100,00	0,00
27	Jumlah Belanja Modal	3.510.170.000,00	3.228.530.000,00	92,26	2.312.768.000,00
28					
29	JUMLAH BELANJA	37.979.583.217,00	36.069.828.023,50	95,00	34.469.842.195,00
30					
31	SURPLUS/DEFISIT	(37.968.083.217,00)	(36.039.603.023,50)	95,03	(34.443.517.195,00)

Laporan realisasi anggaran (LRA) diatas merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintahan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Pada periode 31 Desember 2016 dan 2015 terlihat bahwa persentase realisasi anggaran mengalami

peningkatan senilai 94,92 % sedangkan pada periode 31 Desember 2015 dan 2014 hanya senilai 90,22%.

**Gambar 5**  
**Neraca Periode 31 Desember 2016 dan 2015**

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG SEKERTARIAT DAERAH NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015			
No	URAIAN	2016	2015
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	151.927.665,00	189.728.182,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Piutang Pajak	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi	0,00	0,00
8	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
9	Beban di Bayar di muka	10.210.302,00	0,00
10	Bagian Lancar Tagihan Persewaan Angsuran	0,00	0,00
11	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00
12	Piutang Lainnya	0,00	0,00
13	Persediaan	11.184.700,00	2.014.770,00
14	Jumlah Aset Lancar	173.322.667,00	191.742.852,00
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah	7.322.671.860,00	18.951.078.500,00
18	Peralatan dan Meubel	14.144.678.962,00	10.487.435.105,00
19	Gedung dan Bangunan	13.579.117.116,00	14.959.304.476,00
20	Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.728.266,00	28.728.266,00
21	Aset Tetap Lainnya	4.420.000,00	5.335.750,00
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
23	Akumulasi Penyusutan	(7.542.192.494,00)	(7.594.700.514,00)
24	Jumlah Aset Tetap	27.237.423.710,00	38.837.181.583,00
25			
26	ASET LAINNYA		
27	Tagihan Persewaan Angsuran	0,00	0,00
28	Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00
29	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
30	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
31	Aset Lain-Lain	1.790.455.068,00	0,00
32	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.271.246.923,00)	0,00
33	Jumlah Aset Lainnya	519.208.145,00	0,00
34			
35	JUMLAH ASET	27.929.954.522,00	37.028.924.535,00
36			
37	KEWAJIBAN		
38			
39	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
40	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
41	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
42	Utang Belanja	0,00	0,00
43	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
44	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
45	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
46			
47	EKUITAS		
48			
49	EKUITAS		
50	Ekuitas	27.929.954.522,00	37.028.924.535,00
51	JUMLAH EKUITAS	27.929.954.522,00	37.028.924.535,00
52			
53	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.929.954.522,00	37.028.924.535,00

Laporan neraca diatas menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing - masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang berdasarkan sub variabel pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan dapat dilihat pada rekapitulasi pernyataan responden sebagai berikut :

**Tabel 25**  
**Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

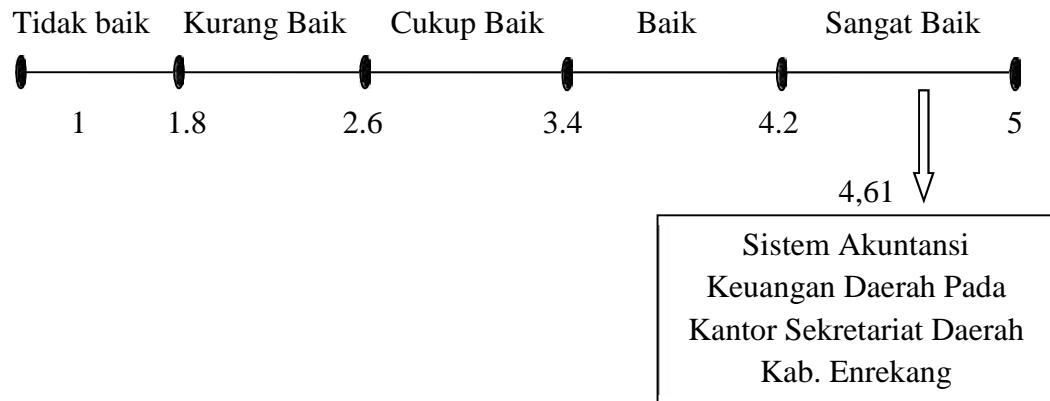
NO	Sub Variabel SKAD	Nilai Rata - rata Total Skor	Keterangan
1	Pencatatan	4,83	Sangat Baik
2	Pengikhtisaran	4,29	Sangat Baik
3	Pelaporan	4,72	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>13,84</b>	
<b>Nilai Rata - rata</b>		<b><math>13,84/3 = 4,61</math> (Sangat Baik)</b>	

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 25 dapat dilihat bahwa sub variabel pencatatan masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,83, sub variabel pengikhtisaran dengan nilai 4,29 termasuk dalam kategori sangat baik serta sub variabel pelaporan juga termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,72. Penilaian sangat baik pada ketiga sub variabel tersebut sesuai dengan jawaban responden atas pernyataan yang diberikan, dimana item pernyataan tersebut diadopsi dari indikator system akuntansi keuangan daerah itu sendiri yang terdiri dari tiap sub variabel yang dikembangkan kedalam beberapa pernyataan.

Adapun nilai rata – rata yang dihasilkan dari penjumlahan nilai rata – rata keseluruhan sub variabel sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang sebesar 4, 61. Sesuai dengan rentang interval yang ditentukan sebelumnya, maka sistem akuntansi keuangan

daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada rentang interval di bawah ini :



Secara umum dijelaskan dari analisis diatas bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang sangat baik.

### 1. Pencatatan

Pada tahap pencatatan setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti memorial, dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal (*journal entry*) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (*posting to ledger*). Berdasarkan hasil analisis jawaban responden diperoleh sub variabel pencatatan masuk dalam kategori sangat baik. Adapun gambaran aktifitas runititas bagian keuangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang telah menerapkan salah satu dari indikator sistem akuntansi keuangan daerah yaitu pencatatan. Dimana terlihat pada gambar bab sebelumnya yang dilampirkan bahwa transaksi keuangan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dicatat dalam buku harian atau jurnal yang kemudian diposting dalam buku besar berdasarkan kelompok atau sejenisnya.

Selanjutnya setiap transaksi keuangan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang didukung oleh bukti transaksi berupa kwitansi.

## **2. pengikhtisaran**

Selanjutnya adalah proses pengikhtisaran, pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang setiap akhir periode dilakukan penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar kemudian dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi *up to date* atau sebenarnya. Selanjutnya penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan yang diikuti dengan neraca saldo setelah penutupan untuk membuat akun nominal menjadi nol. Terakhir adalah pembuatan ayat jurnal pembalik apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan.

## **3. Pelaporan**

Setelah semua proses pencatatan dan pengikhtisaran maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang telah menyajikan semua laporan tersebut. Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintahan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Selain menyajikan LRA Sekretariat Daerah Kab. Enrekang juga menyajikan neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu beserta laporan arus kas (LAK) yang merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitoris. Terakhir Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dimana Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas baik dari jawaban responden yang telah diolah dan fakta yang didapatkan melalui observasi langsung, secara umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang telah memenuhi semua indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang termuat dalam permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan.

Salah satu penunjang terpenuhinya serangkaian prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang adalah tingkat pendidikan yang telah memenuhi standar kompetensi dimana dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-1 yaitu sebanyak 30 responden (53,56%), pendidikan S-2 sebanyak 15 responden (26,78%), pendidikan D-3 sebanyak 1 responden (1,8%). Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SMU/SMK 10 responden (17,86%).

Meskipun secara umum telah dianalisis, dijelaskan dan digambarkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang sangat baik. Namun ada beberapa catatan dari wawancara langsung bahwa masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan disempurnakan pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Kab. Enrekang. Adapun simpulan tanggapan informan yang didapatkan dari

wawancara langsung kepada kepala bagian keuangan sekretariat daerah, penata usaha keuangan (PPK) dan kepala sub bagian verifikasi terkait kelemahan SAKD pada sekretariat daerah sekaligus faktor penghambat belum maksimalnya SAKD pada sekretariat daerah tersebut, yaitu masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan SAKD, tidak tersedianya sumber daya manusia yang andal dalam bidang akuntansi dimana hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang tidak relevan, tidak sesuaiya scedul dalam pelaksanaan kegiatan oleh PPTK, kurangnya partisipasi pegawai, kredibilitas sebuah system akuntansi, kebijakan pimpinan dalam pengangkatan tenaga ahli pelaporan keuangan yang belum sesuai dengan keahliannya serta kurangnya penguatan kompetensi SDM, komitmen serta dukungan dari pimpinan.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang berada pada kategori sangat baik sesuai dengan uraian sebagai berikut :

1. Prosedur Pencatatan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dengan nilai rata – rata 4,83 dan termasuk dalam kategori sangat baik sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden dimana setiap transaksi keuangan dilakukan analisis atau identifikasi transaksi yang didukung oleh bukti transaksi, pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi sesuai dengan pos-pos semestinya serta transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.
2. Pengikhtisaran pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dengan nilai rata – rata 4,29 dan termasuk dalam kategori sangat baik sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden dalam proses pengikhtisaran yang terdiri dari penyusunan nerca saldo berdasarkan akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, necara lajur, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan serta ayat jurnal pembalik.

3. Pelaporan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dengan nilai rata – rata 4,72 dan termasuk dalam kategori sangat baik sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden dalam proses pelaporan yang telah menyajikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan neraca pada akhir periode, membuat catatan atas laporan keuangan serta pelaporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.

## **B. Saran**

Dengan melihat hasil dan analisa penelitian serta kesimpulan, maka hal yang dapat diajukan sebagai saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah yang melibatkan seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kab. Enrekang beserta pihak yang berkepentingan dalam rangka mendukung terlaksananya sistem akuntansi yang maksimal.
2. Pemanfaatan teknologi informasi agar lebih dioptimalkan dengan cara menyiapkan, membangun dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang handal dan baik serta berkualitas untuk mendukung terlaksananya sistem akuntansi keuangan daerah secara maksimal.
3. Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia agar pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afifah, Nunuy Nur. 2009. *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Devas, *et.al.* 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*. Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur. Dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPF.
- Kuncoro Mudrajad. 2014. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta : Erlangga,
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- MD Ihyaul Ulum, 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

### JURNAL

- Erryana dan Hendri. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 1 -14.
- Mardiasmo. 2002. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 63-82.
- Prihandono, Boedi. 2009. Transparansi turut mendorong peningkatan akuntabilitas pengawasan. *Jurnal transparansi*, Vol. 4 No. 1.

- Soleha, Nurhayati. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Etikonomi*, Vol. 13, No.1, 21 - 34.
- Sutaryo. 2011. Manajemen Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi*, Vol 1. No 2.
- Xu, Hongjiang. 2003. *Data Quality Issues For Accounting Information Systems Implementation: Systems, Stakeholders, And Organizational Factors. Journal of Technology Research*, 1-11.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

### **SKRIPSI DAN TESIS**

- Anandita, Dita T. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Bandung). Skripsi terakreditasi Bandung : Universitas Widyatama.
- Kurnia, I. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). Skripsi Padang : Universitas Negeri Padang.
- Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Putri, Ansella. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.
- Santoso, Eli B. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). Tesis Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis Medan: Universitas Sumatra Utara.*

## **ATURAN HUKUM**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor 355/kmk07/2001 dalam pembuatan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD).

**SUMBER INTERNET**

Berita kota Makassar, <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/07/11/13-skpd-tak-punya-lpj-enrekang-disclaimer/> (Diakses 20 Oktober 2017).

Fajar online, <http://parepos.fajar.co.id/2017/06/enrekang-raih-opini-wdp-2016/> (Diakses 20 Oktober 2017)

<b>LAMPIRAN 1</b>
-------------------

Kepada Yth:

Bapak / Ibu Responden

di-

t e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah, maka dengan segala kerendahan hati saya sangat menghargai tanggapan Bapak / Ibu terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai “**Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**”. Pengumpulan data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk maksud penyusunan skripsi dan akan dijamin kerahasiaannya.

Kesediaan dan kerja sama yang Bapak / Ibu berikan dalam bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Selain itu jawaban yang Bapak / Ibu berikan juga akan merupakan masukan yang sangat berharga bagi saya.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Hormat saya,

Rosnani

## Lampiran 2 : Identitas Responden

### KUESIONER PENELITIAN

#### I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : ..... (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : a. SMU b. D-3 c. S-1 d. S-2 e. S-3
4. Jabatan : .....
5. Lama Bekerja : a. Kurang dari 3 tahun b. 3-10 tahun  
c. 11-20 tahun d. 20 tahun keatas
6. Usia saat ini : a. <25 tahun b. 25 – 35 Tahun  
c. 36 – 45 tahun d. 46 – 55 tahun  
e. Lebih 55 tahun

#### II. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Pada masing - masing pertanyaan terdapat lima alternative jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu:

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Cukup Setuju / Netral

2 = Kurang Setuju

1 = Tidak Setuju



NO	PERNYATAAN	SCORING				
		SS	S	CS	KS	TS
	<b>Pencatatan</b>					
1.	Setiap transaksi keuangan pada kantor sekretariat daerah ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi					
2.	Setiap transaksi keuangan pada kantor sekretariat daerah ini didukung oleh bukti transaksi.					
3.	Pada kantor sekretariat daerah ini dilakukan Pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.					
4.	Pada kantor sekretariat daerah ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.					
5.	Pada kantor sekretariat daerah ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya					

NO	PERNYATAAN	SCORING				
		SS	S	CS	KS	TS
	<b>Pengikhtisaran</b>					
1.	Setiap akhir periode disusun neraca saldo berdasarkan akun buku besar					
2.	Pembuatan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode apabila ada akun-akun tertentu yang belum menyajikan <i>data up to date</i> .					
3.	Setiap akhir periode sekretariat daerah ini membuat kertas kerja atau neraca lajur.					
4.	Ayat jurnal penutup dibuat pada akhir periode sehingga akun nominal menjadi nol.					
5.	Pada kantor sekretariat daerah ini dibuat neraca saldo setelah penutupan yang berisi daftar akun riil.					
6.	Sekretariat daerah membuat ayat jurnal pembalik setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan.					

NO	PERNYATAAN	SCORING				
		SS	S	CS	KS	TS
	<b>Pelaporan</b>					
1.	Pada kantor sekretariat daerah ini setiap akhir periode membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran.					
2.	Pada kantor sekretariat daerah ini setiap akhir periode membuat laporan keuangan berupa laporan neraca.					
3	Membuat Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.					
4.	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.					

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen**

1. Nama Tempat :
2. Jabatan :
3. Waktu Wawancara :
4. Lamanya Wawancara :

### **B. Tanggapan Informan**

1. Apakah kelemahan sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah.
2. Bagaimana kelemahan Pencatatan, Pengiktisaran dan Pelaporan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
3. Apakah Faktor – Faktor yang menyebabkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum berjalan dengan baik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
4. Apa kira – kira Solusi untuk Mengatasi kendala Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **C. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen**

5. Nama Tempat : Hendranto, SE. M.Si
6. Jabatan : Kabag Keuangan Sekretariat Daerah
7. Waktu Wawancara : Tanggal 30 Oktober s/d 11 November  
2017
8. Lamanya Wawancara : 30 Menit

### **D. Tanggapan Informan**

5. Apakah kelemahan sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah.
6. Bagaimana kelemahan Pencatatan, Pengiktisaran dan Pelaporan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
7. Apakah Faktor – Faktor yang menyebabkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum berjalan dengan baik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
8. Apa kira – kira Solusi untuk Mengatasi kendala Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

## Gambar / Foto Lokasi Penelitian



**Keterangan : Kantor Bupati Kabupaten Enrekang**



**Keterangan : Wawancara dengan Kabag Keuangan Setda Hendranto, SE. M.Si**



**Keterangan : Wawancara dengan Penata Usaha Keuangan ( PPK)  
Anton Sutrisno,SE**



**Keterangan : Wawancara dengan Kasubag Verifikasi Noor  
Azizah, SE**

## **PEDOMAN OBSERVASI**

### **A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen**

1. Nama Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
2. Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Kabupaten Enrekang
3. Waktu Pengambilan Dokumen : Tanggal 1 s/d 15 November 2017

### **B. Hal – Hal Yang Perlu Diobservasi**

1. Kelemahan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
2. Kelemahan Pencatatan, Pengiktisaran dan Pelaporan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
3. Faktor – Faktor yang menyebabkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum berjalan dengan baik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
4. Solusi untuk Mengatasi kendala Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah
5. Kesimpulan Observasi

## **PEDOMAN TELAAH DOKUMEN**

### **A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen**

1. Nama Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
2. Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Kabupaten Enrekang
3. Waktu Pengambilan Dokumen : Tanggal 1s/d 15 November 2017

### **B. Dokumen Umum**

1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
2. Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

### **C. Dokumen Yang Berhubungan Dengan sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang**

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
3. Dokumen / Arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban, Pengawasan Daerah.
4. Dokumen/ Arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang Kab. Enrekang.



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **Data Pribadi**

Nama : ROSNANI  
Tempat Tanggal Lahir : Kajao, 21 April 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Suku : Maspul  
Status : Kawin  
Alamat : Perumahan Pinang Blok A4 No.4 Kelurahan Leoran  
Kec. Enrekang  
No. Telpon : 085 242 828 852  
Email : [rosnaniabqar@yahoo.com](mailto:rosnaniabqar@yahoo.com)

### **Data Pribadi**

Ayah : RAHIMA  
Ibu : SIDA  
Anak ke : 7 dari 7 Bersaudara  
Suami : INDRA AUDI PUTRA  
Anak : MUHAMMAD ABQAR

### **Data Pendidikan**

SD : SD NEGERI 156 KAJAO  
SLTP : SLTP NEGERI 6 ENREKANG  
SMU : SMU NEGERI 1 ENREKANG

**Data Pekerjaan**

Instansi : SEKRETARIAT DAERAH  
Alamat : Jl. Jend Sudirman No.01 Enrekang  
Jabatan : Staf Sub Bagian, Verifikasi dan Perbendaharaan  
Mulai Bekerja : 01 Januari 2009